

POSISI BEBAS AKTIF INDONESIA DALAM RIVALITAS TIONGKOK DAN AMERIKA SERIKAT DI ASIA TENGGARA TERKAIT PENGADAAN ALUTSISTA

ACTIVE INDEPENDENT POSITION OF INDONESIA IN RIVALITY OF THE US - CHINA IN SOUTHEAST ASIA IN ACCORDANCE WITH DEFENSE SYSTEM EQUIPMENT PROCUREMENT

Semmy Tyar Armandha¹

Alumnus Universitas Pertahanan Indonesia
(semmytyar@gmail.com)

Abstrak - Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok di perairan Asia Tenggara semakin mendorong kewaspadaan negara-negara di Asia Tenggara. Bagi Amerika Serikat, Asia Tenggara merupakan salah satu lokasi *Forward Operating Site* bagi militernya; sementara bagi Tiongkok, Asia Tenggara sebagai salah satu jalur perdagangannya yang paling penting (*String of Pearl*) dan memiliki klaim teritorial di wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan. Artikel ini bertujuan untuk memaknai strategi bebas aktif Indonesia guna merespons rivalitas tersebut dalam konteks pengadaan kapal selam Kelas Chang Bogo dari Korea Selatan. Pertama, hadirnya Chang Bogo dapat menambah kompleksitas modernisasi persenjataan khususnya kapal selam serang di Asia Tenggara. Kedua, di sisi lain, Indonesia semakin aktif dalam rantai pasok persenjataan global yang melibatkan industri pertahanan mancanegara, khususnya kapal selam yang marak digunakan karena efektivitas serang sembunyi (*stealth*). Dengan menggunakan teori *jejaring-aktor*, artikel ini menyimpulkan bahwa kedua posisi Indonesia tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan dalam menghadapi konstelasi regional yang kompleks akibat rivalitas AS-Tiongkok, apabila Indonesia mampu memformulasikan strategi maritim berdasarkan kekuatan kapal selam yang dimiliki.

Kata kunci: Asia Tenggara, kapal selam Kelas Chang Bogo, jejaring-aktor, politik bebas-aktif Indonesia, rivalitas maritim Amerika Serikat-Tiongkok

Abstract - *The ongoing rivalry between the United States and China in Southeast Asian waters, further promote awareness of countries in Southeast Asia. For the United States, Southeast Asia is one of the locations for its military Forward Operating Site; while for China, Southeast Asia as one of the most important trading path (String of Pearl) and have territorial claims over the South China Sea. This article aims to interpret the 'Independent active' foreign policy of Indonesia to respond the rivalry in the context of Chang Bogo-class submarine procurement from South Korea. Firstly, the presence of Chang Bogo can add complexity to the modernization of armament particularly attack submarines in Southeast Asia. Secondly, on the other hand, Indonesia is increasingly active in Global Armament Supply Chain involving foreign defense industries, particularly the submarine flare used for its effectively stealth weapons. By using actor-network theory framework, this article concludes*

¹ Alumnus Ekonomi Pertahanan Cohort 5, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia, Bogor. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Arwin Datumaya Wahyudi Sumari, ST., MT., yang terlibat diskusi membangun argumentasi dalam artikel ini. Namun, keseluruhan isi naskah dan argumentasi sepenuhnya tetap menjadi tanggung jawab penulis.

that both the position of Indonesia should be used in dealing with complex regional constellation as a result of the Sino-US rivalry, if Indonesia was able to formulate a maritime strategy based submarine force possessed.

Keywords: actor-network theory, Chang Bogo-class submarine, independent-active foreign politics, Sino-US maritime rivalry, Southeast Asia

Pendahuluan

Kemajuan teknologi armada tempur maritim semakin pesat, salah satunya ditandai dengan terus berkembangnya kapal selam.² Dengan efektivitas kemampuan serang-sembunyi (*stealth*) yang lebih tinggi dibanding misil, kapal perusak, bahkan pesawat;³ kapal selam merupakan armada yang dapat mencegah ataupun menanggulangi ancaman kapal permukaan. Kapal selam juga dapat mencegah pecahnya peperangan kapal selam (*Anti Submarine Warfare, ASW*), serta kemampuan serang bawah laut ke udara. Begitu mematakannya kapal selam, hingga yang dapat menghadapi kapal selam hanyalah kapal selam ASW. Armada kapal selam menjadi semakin penting bagi suatu negara kepulauan, apalagi bagi negara kepulauan terbesar, Indonesia.

Armada kapal selam Indonesia memiliki sejarah gemilang dalam operasi besar Trikora (Tri Komando Rakyat) merebut Irian Barat dari Belanda. Pada 21 Agustus 1962, salah satu daritiga kapal selam (KRI Nagarangsang, KRI Trisula, dan KRI Tjandrasa) yaitu KRI Tjandrasa berhasil mendaratkan pasukan di Teluk Tanah Merah dalam Operasi Tjakra II.⁴ Pada saat itu, Indonesia menggunakan kapal selam Kelas Whiskey buatan Uni Soviet, dan menjadi negara dengan kapal selam Kelas Whiskey terbanyak setelah Uni Soviet sendiri. Keduabelas kapal selam tersebut pensiun pada tahun 1970-an. Hingga saat ini Indonesia hanya memiliki dua kapal selam, yakni Kelas Cakra/401 dan Kelas Nanggala/402 yang dibeli pada tahun 1981 dari Jerman Barat. Kondisi kedua kapal selam tersebut sudah

² Menurut John Keegan, dunia telah memasuki 'era dimana kapal selam mendominasi persenjataan di laut. Kapal selam tersebut dapat menghancurkan kapal permukaan yang melanggar zona teritorial suatu negara', lihat Peter Howarth, *China's Rising Sea Power: The PLA Navy's Submarine Challenge*, (New York: Routledge, 2006), hlm. 3.

³ Peter Howarth, *China's Rising Sea Power: The PLA Navy's Submarine Challenge*, (New York: Routledge, 2006), hlm. 10.

⁴ Atmadji Sumarkidjo, *Mission Accomplished: Misi Pendaratan Pasukan Khusus oleh Kapal Selam RI Tjandrasa*, (Jakarta: Kata Hasta, 2010), hlm. 1-3.

semakin menua dan akhirnya diputuskan untuk memutakhirkan dan memperbaiki (*refurbish*) keduanya di Korea Selatan.

Wilayah Indonesia yang begitu luas memerlukan armada kapal selam yang lebih banyak. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertahanan yang dirumuskan dalam Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force, MEF*) mengamanatkan sepuluh hingga dua belas kapal selam sebagai jumlah yang ideal, dengan jumlah minimal delapan kapal. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia mulai berupaya menambah jumlah kapal selamnya. Indonesia harus menambah kapal selamnya untuk dapat menjangkau tiga selat utamanya (Malaka, Sunda, dan Lombok).⁵

Sebagai awal upaya pemenuhan MEF tersebut, pada Desember 2011 Korea Selatan dan Indonesia menyepakati jual-beli tiga kapal selam serang Kelas Chang-Bogo Tipe 209/1400. Pada 24 Maret 2016, Korea Selatan bersama dengan *Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering* (DSME) secara resmi meluncurkan satu dari tiga kapal selam berpengerak diesel-elektrik untuk kebutuhan armada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).⁶ Peluncuran tersebut dilakukan di Gyeongsang Selatan, Korea Selatan, dalam upacara yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia (RI) Ryamizard Ryacudu dan Kepala Staf AL Laksamana Ade Supandi. Kapal selam tersebut rencananya akan dikirimkan ke Indonesia pada Maret 2017, sementara dua kapal selam sisanya akan dirampungkan transfer dan pembuatannya pada 2018. Kapal selam ketiga akan dibuat PT. PAL di Surabaya, dengan maksud adanya transfer teknologi dari Korea Selatan kepada Indonesia dalam proses pembuatannya.

Lingkungan Strategis Asia Tenggara

Indonesia memiliki 17.500 pulau dengan tiga Alur Laut Kepulauan (ALKI), serta berbatasan dengan Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional tersibuk di dunia.⁷

⁵ “Indonesia Submarine Capabilities”, (Nuclear Threat Initiative), <http://www.nti.org/analysis/articles/indonesia-submarine-capabilities/>, 2 Agustus 2013, diunduh pada 29 September 2016.

⁶ The Diplomat, “South Korea Launches First Indonesian Stealth Submarine”, (<http://thediplomat.com/2016/03/south-korea-launches-first-indonesian-stealth-submarine/>), 29 Maret 2016, diunduh pada 15 September 2016.

⁷ Yanuar et al, “Konsep Desain Kapal Selam Serang Konvensional”, *Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XIV (SNTTM XIV)*, Banjarmasin, 7-8 Oktober 2015, diunduh pada 1 September 2016.

Adapun laut Indonesia berbatasan dengan sembilan negara, antara lain Malaysia, Singapura, Thailand, India, Australia, Vietnam, Filipina, Republik Palau, dan Timor Leste. Tiga ALKI merupakan alur yang dapat digunakan untuk pelayaran dan penerbangan oleh pihak asing menurut konvensi hukum laut internasional. ALKI pertama melewati Laut Tiongkok Selatan-Selat Karimata-Laut Jawa-Selat Sunda; ALKI kedua melintasi Laut Sulawesi-Selat Makassar-Laut Flores-Selat Lombok; dan ALKI ketiga melintasi Samudera Pasifik-Laut Maluku-Laut Seram-Laut Banda-Selat Ombai-Laut Suwu.⁸

Selat-selat tersebut menghubungkan Laut Tiongkok Selatan dan Selat Malaka yang merupakan perairan utama perdagangan internasional bagi Asia Tenggara. Setiap tahunnya terdapat sekitar 1/3 kapal dagang dunia yang melewati perairan Laut Tiongkok Selatan.⁹ Sekitar 2/3 di antaranya mengangkut gas alam ke kawasan Asia Timur (Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan). Di Selat Malaka, tercatat sekitar 50.000 kapal yang lewat setiap tahunnya, dua kali lebih banyak dari Terusan Suez dan Terusan Panama, dengan 11,7 juta barel minyak dan 80% impor minyak kelapa sawit dari Timur Tengah dan Afrika menuju ke Tiongkok.¹⁰ Terdapat *mega-hub container ports* yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di Korea Selatan-Jepang dan Singapura, menjadikannya jalur pengangkut 68% sumber daya ke Amerika Serikat per tahunnya.¹¹ Ramainya lalu lintas perdagangan ini membuat perairan Asia Tenggara dan Indonesia sangat penting bagi perdagangan global.

Signifikansi perairan Asia Tenggara dan Indonesia sebagai jalur perdagangan global, membuat negara-negara dengan kekuatan besar merasa berkepentingan untuk menjaga jalur tersebut dari ancaman-ancaman baik tradisional maupun non-tradisional. Hal ini di satu sisi dapat menguntungkan Indonesia, namun juga dapat mengancam teritorial Indonesia. Bagi kekuatan-kekuatan besar tersebut tentunya stabilitas politik dan ekonomi Indonesia adalah prasyarat awal bagi keamanan jalur perdagangan. Namun,

⁸ Dewan Kelautan Indonesia, *Evaluasi Kebijakan dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia*, (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008), hlm. 8-13.

⁹ Sudha Ramachandran, "Division Over Terror Threat in Malacca Straits", *Asia Times*, 2004.

¹⁰ Andrew S. Erickson, *Maritime Security Cooperation in the South China Sea Region*, dalam Wu Sichun dan Zou Keyuan (ed), *Maritime Security in the South China Sea: Regional Implications and International Cooperation*, (Farnham: Ashgate Publishing, 2009), hlm. 52.

¹¹ *Ibid*, hlm. 53.

banyaknya armada asing yang dikirim ke area jalur tersebut, apalagi jika terjadi konfrontasi fisik, akan mengganggu keamanan di wilayah maritim Indonesia.

Munculnya Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan ekonomi, politik, dan militer pasca Perang Dingin, membuat semakin meningkatnya pula rivalitas dengan Amerika Serikat sebagai negara *superpower* di berbagai kawasan tidak terkecuali Asia Tenggara. Kehadiran rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di perairan Asia Tenggara ditandai oleh dua kebijakan besar dari dua negara tersebut. Bagi Tiongkok, Asia Tenggara adalah jalur perdagangan paling penting, sehingga Tiongkok menamakan kawasan tersebut sebagai *string of pearl* yang wajib diamankan.¹² Bagi Amerika Serikat, wilayah Asia Tenggara masuk dalam skema *Regional Maritime Security Initiative* (RMSI), yakni salah satu prioritas *Forward Operating Site* (FOS), atau basis militer terdepan.¹³ Kehadiran kedua negara tersebut membuat kawasan Selat Malaka dan Laut Tiongkok Selatan menjadi lebih berbahaya dari sebelumnya.¹⁴

Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di laut telah terjadi sejak ketegangan keduanya di Selat Taiwan pada Maret 1996. Robert Ross menyebut ketegangan ini sebagai “*a critical turning in post-Cold War US-China relations and in the development of a new regional order*”.¹⁵ Pada saat itu Tiongkok mengadakan uji coba misil di dekat perairan Taiwan, yang langsung direspons oleh armada kapal induk Amerika Serikat dengan kekuatan pesawat-pesawat tempurnya. Taiwan sendiri merupakan negara independen yang tidak diakui kemerdekaannya oleh Tiongkok, sementara Amerika Serikat mengakui bahkan memberikan bantuan persenjataan militer bagi Taiwan. Pasca ketegangan tersebut, kebijakan pertahanan Amerika Serikat dan Tiongkok disusun sedemikian rupa dalam konteks mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu harus bertempur secara *head to head*.¹⁶

¹² Anders C. Sjaastad, “Southeast Asian SLOCs and Security Options”, dalam Kwa Chong Guan dan John K. Skogan, *Maritime Security in Southeast Asia*, (New York: Routledge, 2007), hlm. 3.

¹³ *Ibid*, hlm. 136.

¹⁴ Brad Nelson, “Brokering China-US Relations”, *Strategic Review*, Vol. 3, No.3, 2013, hlm. 87

¹⁵ Peter Howarth, *China’s Rising Sea Power: The PLA Navy’s Submarine Challenge*. (New York: Routledge, 2006), hlm. 2.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 2.

Di perairan Asia Tenggara khususnya di Laut Tiongkok Selatan, perseteruan keduanya juga terjadi. Pada 2009, sejumlah kapal nelayan Tiongkok berupaya memotong kabel penghubung peralatan sonar yang ditarik kapal pemantau Amerika Serikat, USNS *Impeccable* di lepas pantai Pulau Hainan.¹⁷ Kemudian pada akhir 2009, kapal selam Tiongkok menghantam peralatan sonar bawah laut yang ditarik kapal perang Amerika Serikat USS John McCain di Subic Bay, lepas pantai Filipina. Perseteruan tersebut tidak terlepas dari klaim Tiongkok atas wilayah Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok bersengketa dengan enam negara di Asia Tenggara yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam.¹⁸ Tiongkok secara sepihak mengklaim wilayah Laut Tiongkok Selatan sebagai bagian dari wilayah maritim-nya. Wilayah yang diklaim, diberi tanda sembilan garis putus-putus (*nine dashed line*) yang melingkupi Kepulauan Spratly dan Paracel, Teluk Tonkin, dan Pulau Natuna. Manuver Tiongkok tidak hanya berhenti pada klaim, namun juga berlanjut pada reklamasi pulau-pulau yang diklaim oleh Tiongkok untuk melengkapi sistem pertahanannya.¹⁹ Dalam kondisi tersebut, Amerika Serikat merasa berkepentingan untuk terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut, dan mengeluarkan kebijakan *pivot back toward Asia* pada 2011 dengan target memperdalam keterlibatan ekonomi, politik, dan militer guna membantu negara-negara aliansi.²⁰

Dapat dikatakan perlombaan senjata di Asia Tenggara justru terjadi dalam konteks rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, dan bukan terjadi secara konkrit di antara negara-negara ASEAN (*Association of South East Asia Nation*). Menurut Aaron Beng, kecenderungan pengadaan persenjataan di negara-negara Asia Tenggara bukan mengarah pada perlombaan senjata melainkan baru sebatas meningkatkan modernisasi militer yang masih dirasa belum mumpuni, meskipun modernisasi tersebut juga diwarnai oleh persaingan diplomatik karena rata-rata dilakukan dengan bekerjasama dengan negara-negara di luar kawasan.²¹ Relasi rivalitas tersebut membuat kondisi keamanan di

¹⁷ Alexander Neill, "Kapal Selam dan Rivalitas di Kedalaman Laut Cina Selatan", www.bbc.com/indonesia/dunia/, 12 Juli 2016, diunduh pada 2 September 2016.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Brad Nelson, "Brokering China-US Relations", *Strategic Review*, Vol. 3, No.3, 2013, hlm. 86.

²¹ Aaron Beng, "Submarine Procurement in Southeast Asia: Potential for Conflict and Prospects for Cooperation", *Pointer, Journal of the Singapore Armed Forces*, Vol. 40, No. 1, 2014, hlm. 59-60.

Asia Tenggara penuh ketidakpastian karena terbaginya negara-negara di kawasan ini ke dalam aliansi Amerika Serikat ataupun Tiongkok.²²

Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan posisi strategis Indonesia terhadap rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di Asia Tenggara melalui dua argumen utama. Pertama, strategi bebas aktif Indonesia di satu sisi harus diakui sangat bergantung pada tensi rivalitas tersebut, namun di sisi lain Indonesia juga dapat memanfaatkan situasi persaingan diplomatik dan ekonomi antara negara Asia Tenggara. Situasi ini memungkinkan Indonesia memperluas jejaring rantai pasokan globalnya guna mengembangkan industri pertahanan. Strategi ini dapat memperkuat prinsip politik luar negeri Bebas Aktif yang bersifat fleksibel.

Kedua, oleh karenanya, pengadaan kapal selam Kelas Chang Bogo dapat dikatakan sebagai upaya Indonesia untuk menghadapi kekuatan kapal selam-kapal selam negara Asia Tenggara sekaligus juga bermakna penting, secara tidak langsung, menghadapi kapal selam Amerika Serikat dan Tiongkok. Namun hal ini tidak dalam konteks ditujukan konfrontasi *head to head* dengan kekuatan-kekuatan tersebut. Jadi, dapat dikatakan Indonesia tidak perlu memainkan strategi *balancing*, melainkan tetap pada strategi *hedging* sebagai ciri politik luar negeri bebas aktif. Hal ini dimungkinkan dengan keterlibatan Indonesia dalam rantai pasok global sebagai dasar dari strategi *hedging*.²³

Artikel ini dibagi menjadi empat bagian. Bagian pertama menjabarkan latar belakang dan argumentasi dari beberapa penstudi terkait konstelasi keamanan regional dan pengadaan kapal selam di Asia Tenggara. Bagian kedua menjabarkan kerangka konseptual penulis terhadap permasalahan dan argumentasi penulis. Bagian ketiga merupakan penjelasan lebih dalam mengenai argumentasi tersebut. Bagian keempat merupakan kesimpulan artikel ini.

²² Evelyn Goh, "Southeast Asian Strategies toward the Great Powers: Still Hedging after all these years?", dalam <http://www.theasanforum.org/southeast-asian-strategies-toward-the-great-powers-still-hedging-after-all-these-years/>, 22 Februari 2016, diunduh pada 1 Oktober 2016.

²³ *Balancing* adalah sikap yang diambil suatu negara dalam merespons naik-turunnya kapabilitas militer negara hegemon di suatu kawasan, dengan ikut menaikkan/menurunkan kapabilitas militernya. *Hedging* adalah sikap yang diambil dengan tidak melihat pada naik/turunnya kapabilitas militer negara hegemon. Lihat Denny Roy, "Southeast Asia and China: Balancing or Bandwagoning?", *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 27, No. 2, 2005, hlm. 306.

Beberapa Argumentasi Terkait Posisi Indonesia dalam Konstelasi Regional

Politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia sejak kemerdekaannya, diyakini masih sangat relevan untuk menghadapi konstelasi politik regional maupun global. Namun politik luar negeri tersebut tetap harus didefinisikan kembali dengan jelas, mengikuti dinamika perkembangan politik global. Sebagai contoh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengusung politik *dynamic equilibrium* (keseimbangan dinamis). *Dynamic equilibrium* adalah pandangan bahwa kekuatan politik di dunia harus secara bersama-sama menciptakan stabilitas baik keamanan maupun ekonomi, tanpa mengandalkan satu kekuatan besar, ataupun dominan. Kebijakan ini memanfaatkan banyaknya forum organisasi yang terbentuk di Asia Tenggara secara khusus, dan forum-forum multilateral lain secara umum.²⁴ Perlu dicatat bahwa kebijakan ini merupakan salah satu respons terhadap rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok.

Visi Poros Maritim Dunia adalah bentuk spesifik dan manifestasi politik luar negeri bebas aktif dalam gaya Presiden Joko Widodo sebagai penerus SBY. Namun, bagi Ristian A. Supriyanto,²⁵ Visi Poros Maritim Dunia masih belum mendekati kebutuhan Indonesia dalam memberdayakan lautnya yang luas. Dalam artikel berjudul “Developing Indonesia’s Maritime Strategy under President Jokowi”, menurut Supriyanto pemerintah Indonesia harus menerapkan strategi maritim yang koheren.²⁶ Strategi maritim yang koheren adalah yang mampu mengidentifikasi lingkungan strategis secara jelas, mampu mendefinisikan kepentingan Indonesia dari lingkungan strategis tersebut, dan mengaplikasikan kebijakan luar negeri dan kebijakan maritim untuk menyesuaikan kepentingan dan ancaman yang tercermin dari lingkungan strategis tersebut. Koherensi ketiga aspek tersebut diperlukan dalam membangun Poros Maritim Dunia.

Lingkungan strategis yang mengelilingi Indonesia sangat kental dengan persaingan Amerika Serikat – Tiongkok. Tanpa menyadari hal ini, menurut Supriyanto, Indonesia akan gagal dalam mendefinisikan kepentingan Indonesia dan ancaman yang

²⁴ Gregory B. Poling, “Dynamic Equilibrium: Indonesia’s Blueprint for a 21st Century Asia Pasific”, www.csis.org/analysis/dynamic-equilibrium-indonesia’s-blueprint-21st-century-asia-pasific, 8 Maret 2013, diunduh pada 26 September 2016.

²⁵ Ristian A. Supriyanto, “Developing Indonesia’s Maritime Strategy under President Jokowi”, *The ASEAN Forum*, Vol. 4, No. 4, Juli-Agustus 2016, dalam <http://www.theaseanforum.org/developing-indonesias-maritime-strategy-under-president-jokowi-1/>, diunduh pada 20 September 2016.

²⁶ *Ibid.*

ada dalam rivalitas tersebut. Menyikapi hal tersebut Indonesia menurutnya sangat berkepentingan dalam menjaga teritori guna menegaskan kedaulatan. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang merupakan wilayah tempat mendulang sumber daya alam, adalah yang paling penting untuk dipertahankan.²⁷

Terkait dengan ‘menghadapi rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok’, Brad Nelson memiliki pandangan sendiri yang ia tulis dalam artikelnya “Brokering China-US relations”. Menurutnya Indonesia harus aktif dalam menjadi mediator bahkan *broker* perdamaian antara Amerika Serikat dan Tiongkok.²⁸ Politik luar negeri bebas aktif sejatinya sangat mendukung Indonesia melakukan hal tersebut, dan manfaat yang akan didapatkan sangat besar baik dari sisi diplomasi; ekonomi; maupun keamanan. Rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok memang sangat berbahaya bagi kawasan manapun yang dihinggapinya oleh rivalitas tersebut, namun rivalitas ini berbeda dengan apa yang terjadi pada era Perang Dingin (Amerika Serikat vs. Uni Soviet). Tiongkok tidak mentransfer ideologinya ke negara lain seperti halnya Uni Soviet. Tiongkok juga menikmati pertumbuhan ekonomi yang pesat dari sistem ekonomi politik liberal-kapitalisme. Oleh karenanya, menurut Nelson dua kekuatan besar tersebut cenderung tidak akan berperang satu sama lain.²⁹ Hanya Agresivitas Tiongkok yang disambut dengan respons reaktif Amerika Serikat yang dapat memecah perang di antara keduanya. Posisi Indonesia dengan politik bebas aktif akan sangat bermanfaat meredam rivalitas tersebut.

Argumentasi Supriyanto dan Nelson sangat penting dalam melihat lingkungan strategis Indonesia. Namun, keduanya belum melihat secara spesifik dinamika pengadaan kapal selam sebagai armada mematikan yang saat ini paling diandalkan dalam pertahanan maritim. Bagian selanjutnya akan menjabarkan argumentasi terkait dinamika pengadaan kapal selam.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Broker* adalah pedagang perantara. Brad Nelson, “Brokering China-US Relations”, *Strategic Review*, Vol. 3, No.3, 2013, hlm. 87.

²⁹ Brad Nelson, “Brokering China-US Relations”, *Strategic Review*, Vol. 3, No.3, 2013, hlm. 87.

Argumentasi terkait Dinamika Pengadaan Kapal Selam

Kapal selam seharusnya tidak dipadang sebagai ‘senjata dari sang lemah’ untuk menggetarkan ‘yang kuat’.³⁰ Kesimpulan ini diambil oleh Jan J. Andersson dalam melihat semakin maraknya pengadaan kapal selam di Asia Tenggara. Andersson sampai pada kesimpulan ini karena ia melihat hampir tidak ada arti penting dari pengadaan tersebut. Perawatan dan pengoperasian kapal selam yang membutuhkan dana besar serta proses pelatihan bertahun-tahun, membuat negara-negara Asia Tenggara yang rata-rata ekonominya masih berkembang masih akan sangat kesulitan dalam mewujudkan kapal selam sebagai salah satu daya penggetar. Andersson menyarankan agar negara-negara Asia Tenggara lebih fokus pada pelatihan untuk persiapan mengoperasikan kapal selam, ketimbang memperbanyak jumlah kapal selam.³¹

Senada dengan Andersson, Supriyanto dalam artikelnya “Strategic Funnels: Deciphering Indonesia’s Submarine Ambitions”, meragukan pengadaan kapal selam yang dilakukan Indonesia. Menurutnya teknologi kapal selam terlalu tinggi bagi untuk kemampuan Indonesia.³² Selain itu, kapal selam bersifat sangat destruktif. Ketimbang memiliki kapal selam, Supriyanto mengusulkan agar dilakukan diplomasi yang lebih intensif sebagai ganti dari ‘*Anti-Submarine Warfare*’. Meningkatkan kerja sama latihan bersama antar negara juga merupakan usulan Supriyanto.

Pola yang dapat ditangkap dari keempat argumentasi tersebut adalah, bahwa Indonesia harus tetap pada pendiriannya untuk mengimplementasikan politik luar negeri bebas aktif di tengah ketidakpastian yang dihasilkan dari kompleksitas regional dan rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok. Supriyanto dalam dua artikelnya merekomendasikan strategi maritim yang aktif namun dengan tetap realistis pada keputusan untuk mengadakan kapal selam yang merupakan senjata yang tergolong agresif dan mematikan.³³ Nelson melihat potensi Indonesia untuk menjadi negara yang aktif dalam

³⁰ Jan J. Andersson, “Submarine Capabilities and Conventional Deterrence in Southeast Asia”, *Contemporary Security Policy*, Vol. 36, No.3, 2015, hlm. 473.

³¹ *Ibid.*

³² Ristian A. Supriyanto, “Strategic Funnels’: Deciphering Indonesia’s Submarine Ambitions”, RSIS Commentary, dalam www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/co15263-strategic-funnels-deciphering-indonesias-submarine-ambitions/, 3 Desember 2015, diunduh pada 20 September 2016.

³³ *Ibid.*

mengelola konflik laten antara Amerika Serikat dan Tiongkok.³⁴ Begitu juga dengan Andersson yang melihat tidak ada perlombaan senjata yang signifikan di Asia Tenggara, sehingga Indonesia hanya perlu fokus pada kapabilitas dan ancaman dari aktor non-negara.³⁵

Namun dari keempatnya belum ada yang secara langsung mengaitkan dinamika pengadaan kapal selam dengan konstelasi regional dan rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok. Bagaimanapun juga, Indonesia tetap melakukan pengadaan kapal selam, begitu juga dengan negara-negara lain. Tingginya tensi rivalitas kapal selam tidak akan terelakan lagi di masa depan (akan dibahas lebih rinci dalam pembahasan). Dengan demikian, analisis lebih lanjut yang dibutuhkan adalah untuk mempertanyakan apa artinya bilamana suatu negara (khususnya Indonesia) memiliki kapal selam dalam menghadapi kompleksitas regional dan rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok? Artikel ini akan memadukan argumentasi rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok dan argumentasi dinamika pengadaan kapal selam menggunakan konsep jejaring-aktor untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Teori Negara Jejaring-Aktor

Konteks yang melatarbelakangi teori negara jejaring-aktor adalah perubahan bentuk interaksi kedaulatan masa kini yang sangat ditentukan pada periode 1970-an hingga 1990.³⁶ Krisis ekonomi di kawasan Amerika dan Eropa dan berakhirnya Perang Dingin, membawa dunia pada interaksi yang lebih kompleks. Tatanan neo-liberalisme yang diusung oleh Amerika Serikat sebagai pemenang Perang Dingin, mendorong terjadinya globalisasi dan ekonomi pasar yang ekspansif. Interaksi antar negara pada masa ini juga ditambah dengan pesatnya teknologi di segala lini.

Jan-Hendrik Passoth melihat perubahan tersebut sebagai mencabangnya cara pandang terhadap negara sebagai aktor (sebuah entitas yang uniter), ditambah dengan cara pandang negara sebagai jejaring.³⁷ Cara pandang negara sebagai jejaring, melihat

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ J. Samuel Barkin, "The Evolution of the Constitution of Sovereignty and the Emergence of Human Rights Norms", *Millenium Journal of International Studies*, Vol. 27, No. 2, 1998, hlm. 230-232.

³⁷ Jan-Hendrik Passoth & Nicholas J. Rowland, "Integrating Actor-Network Theory and State Theory", *International Sociology*, Vol. 25, No. 6, 2010, hlm. 819-820.

bahwa entitas negara bukan lagi sumber dari mekanisme pengaturan melainkan sebagai efek dari mekanisme pengaturan tersebut.³⁸ Secara sederhana, negara tidak akan ada tanpa masyarakat yang menganggap bahwa negara itu ada, dan sebaliknya, masyarakat tidak perlu negara lagi untuk menyatakan bahwa dirinya adalah bagian dari warga negara dan/atau mengakui eksistensi negara. Dengan kata lain, tidak ada lagi negara, yang ada hanya ke-negara-an (*stateness*).³⁹

Namun, cara pandang negara sebagai aktor tetap merupakan cara pandang yang paling dominan, sebut saja pendekatan-pendekatan utama dalam hubungan internasional seperti realisme dan liberalisme. Cara pandang ini yang dianggap paling praktis dalam menentukan kebijakan strategis ataupun rekomendasi pembentukan tatanan internasional guna mewujudkan perdamaian (melalui organisasi internasional, misalnya). Oleh karenanya, Passoth melihat cara pandang ini tidak dapat dikesampingkan karena manfaat tersebut⁴⁰.

Argumentasi Supriyanto, Nelson, dan Gindarsah-Priamarizki melihat dalam lensa negara sebagai aktor, sehingga mampu memberikan rekomendasi strategis. Namun ketiganya tidak melihat bentuk spesifik negara modern dan sifat *stateness*-nya, sehingga ketiganya tidak bisa memasukan faktor-faktor lain di luar negara sebagai aktor sosial. Dalam hal ini, material teknologi seperti kapal selam dan persenjataan lain yang perannya tidak dapat lagi dinafikan. Teori Jejaring-Aktor (*Actor-Network Theory*, ANT) merupakan alternatif dalam menjembatani antara cara pandang negara sebagai aktor dan cara pandang negara sebagai jejaring.⁴¹

Teori ANT melihat aspek manusia dan nir-manusia sebagai dua hal yang simetris. Aspek manusia tidak akan berpengaruh atau bahkan tidak akan eksis apabila tidak

³⁸ *Ibid*, hlm. 824.

³⁹ Gilles Deleuze, *Foucault*, (Frankfurt: Suhrkamp, 1986), hlm. 106.

⁴⁰ Jan-Hendrik Passoth & Nicholas J. Rowland, *op.cit*.

⁴¹ Istilah 'Jejaring' dalam ANT merujuk pada makna metafora yang diambil dari konsep *rhizome* (kecambah), yang dikembangkan oleh Gilles Deleuze dan Felix Guattari untuk menjelaskan sebuah model pertumbuhan yang tidak lagi bergantung pada konsep tunggal dan universal, melainkan keanekaragaman konsep-konsep yang menjalar ke segala arah, dan membentuk berbagai persinggungan dan persilangan yang tanpa batas. Lihat John Law, *Aircraft Stories: Decentering the Object in Technoscience*, (Durham & London: Duke University Press, 2002), hlm. 1 dan 8; dan Yasraf Amir Piliang, *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui batas-batas Kebudayaan*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2004), hlm. 24

berinteraksi dengan aspek nir-manusia.⁴² Begitu pula negara, tidak akan eksis tanpa interaksinya dengan teknologi ataupun benda-benda lain yang berada di sekitarnya.⁴³ Untuk itu, teori ANT mengganti kata ‘aktor’ dengan ‘aktan’ sebagai bentuk pengakuan terhadap setaranya faktor nir-manusia. Baik manusia maupun nir-manusia akan disebut dengan aktan. Interaksi antara aktan satu dengan aktan lain disebut sebagai *translasi*. Sederhananya, translasi adalah mutasi suatu aktan ketika berinteraksi dengan aktan lain. Tanpa *translasi*, niscaya tidak akan ada fenomena, ataupun keberhasilan suatu strategi dalam relasi antar negara. Passoth mengaplikasikan teori ANT dalam kajian tentang negara dan merumuskannya menjadi teorinegara jejaring-aktor(*Actor-Network State*).⁴⁴

Jim Johnson membuat suatu hipotesis kerja sederhana untuk merangkum cara kerja analisis jejaring-aktor, yaitu “ketika Anda ingin mengetahui apa yang dilakukan sebuah/seorang manusia/nir-manusia lakukan, imajinasikan saja apa yang akan nir-manusia/manusia lain lakukan ketika yang lain tidak hadir”.⁴⁵ Terkait dengan pembahasan dalam artikel ini, translasi yang terjadi antara aktan kapal selam dan aktan pemerintah Indonesia akan dianalisis. Pertama, pemetaan kekuatan kapal selam negara-negara Asia Tenggara, Amerika Serikat dan Tiongkok (Asia Pasifik) akan ditampilkan dan dianalisis translasi antar aktan tersebut. Kedua, pengadaan kapal selam Chang Bogo dan perannya dalam politik bebas aktif Indonesia akan dijabarkan dan dianalisis keterkaitannya.

Kapabilitas Kapal Selam

Di dunia terdapat berbagai jenis kapal selam baik yang digunakan untuk keperluan sipil maupun militer. Kapal selam sipil biasanya digunakan untuk keperluan eksplorasi dan penelitian sumber daya alam di laut, sedangkan kapal selam militer digunakan untuk keperluan pertahanan. Kapal selam militer memiliki beberapa jenis lagi baik dari segi kegunaan maupun pembangkit tenaganya. Dari segi kegunaan, terdapat kapal selam latihan dan kapal selam serang. Dari segi pembangkit tenaga, terdapat kapal selam

⁴² John Law, “Actor Network Theory and Material Semiotics”, dalam <http://www.heterogeneities.net/publications/Law2007ANTandMaterialSemiotics.pdf>, 25 April 2007, diunduh pada 1 Agustus 2016, hlm. 8.

⁴³ Jan-Hendrik Passoth & Nicholas J. Rowland, “Integrating Actor-Network Theory and State Theory”, *International Sociology*, Vol. 25, No. 6, 2010, hlm. 819-820.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 819.

⁴⁵ Nick Srnicek, “Conflict Networks: Collapsing the Global into Local”, *Journal of Critical Globalisation Studies*, Issue 2, 2010, hlm. 33.

bertenaga nuklir (SSN) dan bertenaga diesel-elektrik (SSK). Jenis kapal selam serang adalah yang paling mendapatkan pembaharuan terus menerus dan dipersaingkan oleh negara-negara yang memilikinya.

Keunggulan yang dipersaingkan dalam teknologi kapal selam adalah kemampuan sembunyi untuk menghindari radar musuh dan ASW, kemampuan sembunyi dengan meminimalkan suara propulsi (mesin penggerak baling-baling), kedalaman dan lama menyelam, kemampuan deteksi musuh (periskop dan radar), dan kemampuan serang ataupun anti-serang dengan torpedo. Keunggulan-keunggulan tersebut ditambah dengan tenaga penggerak propulsi yang pada saat ini didominasi oleh pengembangan SSN dan SSK. Kedua teknologi inilah yang membuat semakin banyak negara yang membeli kapal selam karena semakin murah bahan bakar untuk menjalankan kapal selam, dan secara bersamaan menambah daya tahan ketika berada di dalam air.⁴⁶

Kapal selam juga dapat diandalkan untuk mengumpulkan data intelejen, mengeksplorasi sumber daya laut, membawa tim operasi khusus, dan jika dilengkapi dengan misil dapat menyerang target yang ada di darat ataupun udara.⁴⁷ Beberapa kapal selam dengan spesifikasi *Air Independent Propulsion* (AIP) dapat secara total menghilang dari radar musuh. Kapabilitas tersebut memungkinkan operasi *reconnaissance* (pengintaian) dengan sempurna, ditambah dengan kemampuan menyelam hingga berminggu-minggu tanpa muncul ke permukaan.

Persebaran dan Translasi Kapal Selam di Asia Pasifik

Pengadaan kapal selam di kawasan Asia Pasifik dalam kurun waktu pasca krisis ekonomi 1998, hingga saat ini sedang mengalami peningkatan.⁴⁸ Indonesia memiliki dua kapal selam Kelas Cakra dan Kelas Nanggala Tipe 209 dengan penambahan tiga kapal selam Kelas Chang Bogo pada 2017, dan diproyeksikan akan memiliki tambahan tujuh kapal

⁴⁶ Kelvin Fong, "Undersea Dragons Ahoy! Asian Submarine Forces on the Rise", dalam www.shpmedia.com, Mei 2009, diunduh pada 2 September 2016.

⁴⁷ Jan J. Andersson, *op.cit.*, hlm. 477-478.

⁴⁸ Felix K. Chang, "Comparative Southeast Asian Military Modernization – III", <http://www.theasanforum.org/comparative-southeast-asian-military-modernization-3/>, 16 Januari 2015, diunduh pada 1 Oktober 2016.

selam lagi, sehingga pada 2020 Indonesia akan memiliki dua belas kapal selam.⁴⁹ Malaysia dengan dua Kelas Scorpene, diproyeksikan akan bertambah satu lagi pada 2020; Singapura dengan dua Kelas Archer dan empat Kelas Challenger'; dan Vietnam yang sedang memesan enam Kelas Kilo dari Rusia.⁵⁰ Australia memiliki enam Kelas Collin, dengan proyeksi akan bertambah menjadi dua belas hingga 2020; sementara itu, India memiliki empat belas kapal selam (satu Kelas Chakra, empat Sishumar, sembilan Sindhughosh), dengan proyeksi bertambah menjadi dua puluh empat pada 2020.⁵¹

Amerika Serikat dan Tiongkok masing-masing memiliki tujuh puluh satu dan enam puluh satu armada kapal selam. Kekuatan kapal selam Amerika Serikat di antaranya empat belas kapal selam dengan rudal balistik dan berpenggerak nuklir(SSBN) dan lima puluh tujuh *tactical* dengan rincian: dua belas SSN dan empat puluh lima kapal selam dengan peluncur rudal kendali berpenggerak nuklir (SSGN) dan diproyeksikan berkurang hingga dua puluh tujuh pada 2020.⁵² Sebaliknya, Tiongkok memiliki enam puluh satu armada, antara lain terdiri dari empat kapal selam Kelas Jin Tipe 904 yang berpenggerak nuklir dengan senjata peluncur rudal balistik (SLBM); dan lima puluh tujuh kapal selam *tactical* (tanpa senjat rudal). Dari lima puluh tujuh kapal selam *tactical* tersebut terdapat lima SSN, lima puluh satu SSK, dan satu berpeluncur balistik dan akan bertambah hingga tujuh puluh delapan pada 2020.⁵³

Dari data di Tabel 1, dapat diketahui bahwa hampir seluruh negara memiliki kapal selam SSK kecuali Amerika Serikat yang seluruh armadanya sudah menggunakan penggerak nuklir. Di luar negara Asia Tenggara; India, Amerika Serikat, dan Tiongkok memiliki kapal selam berpenggerak nuklir (SSN). Adapun Amerika Serikat memiliki kapal selam dengan teknologi misil kendali yang tidak dimiliki Tiongkok, walaupun Tiongkok memiliki kapal selam terbanyak. Dari peta kekuatan tersebut, terlihat bahwa kekuatan kapal selam Amerika Serikat dan Tiongkok asimetris dengan kekuatan kapal selam Asia Tenggara dan Australia. Besarnya kekuatan kapal selam (dan keseluruhan armada

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ International Institute for Strategic Studies, "Chapter Six: Asia", *The Military Balance*, 116:1, 2016, hlm. 242.

⁵² International Institute for Strategic Studies, "Chapter Three: North America", *The Military Balance*, 116:1, 2016, hlm. 41.

⁵³ International Institute for Strategic Studies, "Chapter Six: Asia", *The Military Balance*, 116:1, 2016, hlm. 242.

maritim) kedua negara tersebut, memungkinkan penetrasi dilakukan ke wilayah-wilayah perairan di Asia Tenggara yang dianggap sangat memiliki arti penting.

Tabel 1. Persebaran Kapal Selam di Kawasan Asia Pasifik saat ini dan proyeksi pada 2020

	Jenis	Jumlah	
Amerika Serikat	14 SSBN 12 SSN 45 SSGN	71	61
Australia	6 SSK	6	12
India	1 SSN 13 SSK	14	24
Indonesia	2 SSK	2	12
Malaysia	2 SSK	2	2
Singapura	4 SSK	4	4
Tiongkok	4 SSBN 5 SSN 51 SSK 1 SSB	61	78
Vietnam	2 SSK	0	6

Sumber: International Institute for Strategic Studies (IISS), “The Military Balance 2016”, (116:1, 2016)

Dari pemetaan tersebut, dapat dianalisis proses translasi yang menjejarkan antara aktan kapal selam dan aktan negara. Translasi tersebut dapat dilihat dalam dua bentuk: *pertama*, translasi yang memungkinkan manuver politik keduanya terhadap kawasan negara berkembang; dan *kedua*, translasi yang memungkinkan negara berkembang mengantisipasi manuver politik dari Amerika Serikat dan Tiongkok. Ketiga translasi tersebut tidak sama dengan praktik perimbangan kekuatan. Dalam pemetaan tersebut terlihat bahwa negara-negara Asia Tenggara bukanlah lawan bagi negara-negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, bahkan India dan Australia. Dengan biaya perawatan yang mahal dan pengoperasian yang membutuhkan pelatihan panjang, negara-negara di Asia Tenggara hanya dapat menghadirkan kapal selam namun butuh waktu lebih panjang untuk dapat memanfaatkannya secara optimal dan taktis.⁵⁴ Dengan demikian, translasi di

⁵⁴ Jan J. Andersson, *op.cit*, hlm. 474.

sini merujuk pada dinamika interaksi antara negara-negara yang terlibat dalam keamanan maritim di Asia Tenggara dengan keberadaan kapal selam.

Agresivitas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan sangat membuat negara-negara yang terlibat senketa dengannya menaruh kewaspadaan yang tinggi.⁵⁵ Peningkatan pengadaan kapal selam di Asia Tenggara merupakan tindakan untuk merespons Agresivitas tersebut. Hal ini menjadikan justifikasi oleh Amerika Serikat untuk turut masuk kembali ke Asia Tenggara melalui kebijakan *pivot back toward Asia*. Dalam kebijakan ini, Amerika Serikat menegaskan pentingnya *freedom of navigation* di kawasan Laut Tiongkok Selatan sebagai harga mati.⁵⁶ Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Pertahanan Amerika Serikat Ashton Carter: *'any further militarization of disputed features'*, dan akan *'terbang, berlayar, dan beroperasi dimanapun hukum internasional mengizinkan'*.⁵⁷

Untuk mendukung hal tersebut, Amerika Serikat mengirim empat kapal permukaan (dua Kelas *freedom* dan dua Kelas *independence*) pada 2018 mendatang. Di sisi lain, Tiongkok menyatakan siap kapan saja menghadapi kapal perang Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan.⁵⁸ Pada Oktober 2015, kapal *destroyer* Tiongkok membayangi kapal perang Amerika Serikat dan memberikan peringatan bahwa akan ada tindakan spontan apabila gerak-gerik kapal Amerika Serikat *'menyenggol'* kawasan Laut Tiongkok Selatan.⁵⁹

Dalam konteks persaingan tersebut, kapal selam yang dimiliki negara-negara Asia Tenggara menjadi terjejaring. Terjejaring yang dimaksud adalah bahwa kapal selam menjadi satu kesatuan dinamika *'keamanan maritim'* di Asia Tenggara. Tanpa rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok, kapal selam akan bermakna lain, atau merujuk kepada jejaring fenomena lain/perimbangan kekuatan lain/isu-isu lain. Dengan adanya rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok, perimbangan kekuatan tampak terjadi antara Asia Tenggara dan

⁵⁵ "China is Fueling a Submarine Arms Race in the Asia-Pacific", *Foreign Policy*, <http://foreignpolicy.com/2016/08/26/china-is-fueling-a-submarine-arms-race-in-the-asia-pacific/>, 26 Agustus 2016), diunduh pada 30 September 2016.

⁵⁶ International Institute for Strategic Studies, "Chapter Six: Asia", *The Military Balance*, 116:1, 2016, hlm. 211
⁵⁷ *Ibid*, hlm. 211.

⁵⁸ "China says it's ready if US 'stirs up any conflict' in South China Sea", CNBC, <http://www.cnbc.com/2016/05/19/china-says-its-ready-if-us-stirs-up-any-conflict-in-south-china-sea.html>, 19 Mei 2016, diunduh pada 3 Oktober 2016.

⁵⁹ International Institute for Strategic Studies, "Chapter Six: Asia", *The Military Balance*, 116:1, 2016, hlm. 211.

Amerikas Serika-Tiongkok. Dengan kata lain, rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok merupakan relasi episentrum (pusat) yang memiliki “gravitasi” dalam dinamika keamanan maritim di Asia Tenggara. Rivalitas ini memungkinkan komunitas epistemik (baik media maupun akademisi) membicarakan betapa berbahayanya Laut Tiongkok Selatan saat ini.⁶⁰

Motivasi menjaga perbatasan laut dan jalur perdagangan dari ancaman terorisme, pembajakan, perampokan, penyelundupan, dan sebagainya, juga harus dilihat sebagai mekanisme translasi dalam pengadaan kapal selam di Asia Tenggara. Amerika Serikat juga menggunakan kasus-kasus tersebut sebagai motivasi menjadikan wilayah perairan Asia Tenggara sebagai garis terdepan pertahanan militernya. Tercatat perairan di Asia Tenggara merupakan salah satu perairan yang paling sering mengalami pembajakan, perampokan, penyelundupan, dan sebagai jalur masuk teroris.⁶¹ Pasca tragedi serangan terorisme ke gedung World Trade Center di Amerika Serikat pada 11 September 2001, Presiden George W. Bush, Jr. mencanangkan perang global terhadap terorisme (*Global War on Terror*). Asia Tenggara ditetapkan menjadi “*Second Front*”, atau kawasan kedua setelah Timur Tengah yang diperkirakan menjadi pusat berkembangnya terorisme. Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang merupakan tiga negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dianggap sangat potensial dalam persebaran terorisme.⁶²

Sikap Amerika Serikat yang cenderung responsif dalam menghadapi ancaman potensial di Asia Tenggara yang datang dari Tiongkok, membuat lebih banyak dukungan yang mengalir dari negara-negara di kawasan ini. Singapura, Malaysia, Filipina, dan Malaysia (bersama dengan Jepang) memfasilitasi pesawat pembawa pesawat tempur P-8 Poseidon, *maritime air surveillance*, dan ASW Amerika Serikat untuk bersandar di pangkalan-pangkalan militernya.⁶³ Sikap ini menurut Corwin Hardy merupakan bentuk dari respons terhadap ketidakpastian ancaman yang disebabkan oleh Agresivitas

⁶⁰ “The ‘Inevitable War’ Between The U.S. and China”, *Newsweek*, <http://www.newsweek.com/south-china-sea-war-nuclear-submarines-china-united-states-barack-obama-xi-473428>, 22 Juni 2016, diunduh pada 3 Oktober 2016.

⁶¹ Peter Howarth, *China’s Rising Sea Power: The PLA Navy’s Submarine Challenge*, (New York: Routledge, 2006), hlm. 10.

⁶² Andrew Tan, “*Security Strategies in the Asia-Pacific: The United States “Second Front” in Southeast Asia*”, (New York: Palgrave Mcmillan, 2011), hlm. 3-4.

⁶³ Evelyn Goh, *op.cit.*

Tiongkok.⁶⁴ Kehadiran kapal selam Tiongkok membuat Amerika Serikat semakin waspada dengan mengirimkan lebih banyak kapal intainya.⁶⁵ Hal ini berpotensi menimbulkan ‘kecelakaan’, yaitu kontak antara armada Amerika Serikat dan Tiongkok.

Pengadaan Kapal Selam Kelas Chang Bogo: Translasi Politik Bebas Aktif

Translasi kedua akan dijelaskan khusus dalam konteks pengadaan kapal selam Kelas Chang Bogo oleh Indonesia. Translasi inilah yang menjadi argumen kunci bagi politik bebas aktif yang diusulkan dalam artikel ini. Sejak 2003 ketika mulai berupaya menambah kekuatan armada laut khususnya kapal selam, Indonesia bernegosiasi dengan beberapa negara untuk pengadaan kapal selam. Kandidat-kandidat tersebut di antaranya adalah Rusia, Prancis, dan Korea Selatan. Rusia memiliki kapal selam Kelas Kilo yang sangat populer di pasar, sehingga Indonesia tertarik untuk membelinya. Tiongkok, India, dan Vietnam diketahui memiliki dan memesan Kelas kilo untuk pertahanan maritimnya.

Namun, karena Rusia tidak menyediakan fasilitas transfer teknologi dan pengalaman kurang baik sewaktu mengoperasikan Kelas Whiskey pada 1960-an, Indonesia untuk sementara memilih Korea Selatan. Prancis dengan Kelas Scorpene-nya juga menjadi opsi karena Malaysia saat ini mengoperasikan dua buah Kelas Scorpene. Hingga saat ini, Kementerian Pertahanan masih membuka kemungkinan untuk tetap bekerjasama dengan Rusia dan Prancis untuk memenuhi dua belas kapal selam yang diamanatkan MEF.⁶⁶

Proses pembangunan kapal selam Chang Bogo yang dipesan Indonesia, dimulai sejak 2013 dibawah DSME dan diawasi oleh Satgas Yekda KDSE DSME 209 pimpinan Kolonel Iwan Isnurwanto.⁶⁷ Indonesia mengirimkan seratus dua belas teknisi untuk

⁶⁴ Corwin J. Hardy, “*At Periscope Depth: Exploring Submarine Proliferation in Southeast Asia*”, (Monterey: Dudley Knox Library, 2015), hlm. 4-5.

⁶⁵ “The ‘Inevitable War’ Between The U.S. and China”, *Newsweek*, <http://www.newsweek.com/south-china-sea-war-nuclear-submarines-china-united-states-barack-obama-xi-473428>, 22 Juni 2016, diunduh pada 3 Oktober 2016.

⁶⁶ “France offers Indonesian Navy’s Diesel-Electric Sub New Combat System”, dalam <http://thediplomat.com/2016/01/france-offers-indonesian-navys-diesel-electric-sub-ne-combat-system/>, 12 Januari 2016, diunduh pada 1 Oktober 2016.

⁶⁷ “Sophisticated Features of Indonesia’s Submarine Made in S. Korea”, <http://en.tempo.co/read/news/2016/03/24/056756747/Sophisticated-Features-of-Indonesias-Submarine-Made-in-S-Korea>, 24 Maret 2016, diunduh pada 15 September 2016.

terlibat dalam pembuatan di pabrik DSME, dan pada proses pembangunan kapal selam ketiga dilakukan di Surabaya sebagai bentuk dari transfer teknologi dari Korea Selatan terhadap Indonesia. Transfer teknologi inilah yang menjadi faktor utama Indonesia dalam memilih Korea Selatan sebagai rekanan dalam pengadaan kapal selam.

Chang Bogo merupakan pengembangan lebih lanjut dari kapal selam Tipe 209 buatan Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), Jerman. Sistem tempurnya dilengkapi dengan empat belas torpedo 533 mm dengan delapan peluncur, didesain dengan kapabilitas anti misil kapal permukaan.⁶⁸ Bobotnya mencapai 1.200 ton dengan panjang 55,9 meter. Kecepatan dapat ditempuh hingga tiga puluh sembilan kilometer per jam ketika berada di bawah permukaan air, dan dua puluh kilometer per jam ketika berada di atas permukaan air. Kapal selam ini akan dilengkapi dengan misil kendali. Daya tahan mencapai lima puluh hari dengan awak kapal mencapai tiga puluh satu orang.⁶⁹ Chang Bogo memiliki fitur teknologi *Non-hull Penetrating Mast and Comfortable Accommodation*. Fitur teknologi tersebut mampu memaksimalkan daya penglihatan periskop yang memang diandalkan untuk melihat kondisi di permukaan ketika kapal selam berada di dalam air. Fitur ini sejatinya telah dikembangkan DARPA (*Defense Advanced Research Projects Agency*) sejak tahun 1985-1994 yang bertujuan untuk menambah efisiensi jelajah kapal selam, serta kenyamanan awak kapal selama berada di dalam badan kapal.⁷⁰

Basis operasi kapal selam Indonesia saat ini dipusatkan di Palu, Selat Makassar karena kedalamannya yang cocok dengan kapal selam. Selain itu, kawasan tersebut dekat dengan kawasan Ambalat (ambang batas laut) dan pulau Sipadan-Ligitan.⁷¹ Dengan fitur misil kendali dan daya tahan selama lima puluh hari, kapal selam ini dapat menjadi penggetar bagi beberapa negara yang ada di wilayah dekat Selat Makassar seperti Malaysia, Filipina, dan Palau. Dengan kapabilitas tersebut, Chang Bogo dapat membantu mengimplementasikan prinsip *'fleet in being'*. Prinsip tersebut dikenal dikalangan pelaut

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ "Submarine: Chang Bogo Heads For Indonesia", dalam <https://www.strategypage.com/htmw/htsub/20160430.aspx>, 30 April 2016, diunduh pada 15 September 2016.

⁷⁰ "Non-Penetrating Periscope", (Defense Advanced Research Projects Agency, dalam <http://www.darpa.mil/about-us/timeline/non-penetrating-periscope>), diunduh pada 10 Oktober 2016

⁷¹ "Indonesia's Submarinedoctrine explained", *The Diplomat*, dalam www.thediplomat.com/2013/07/indonesias-submarine-doctrine-explained/, 19 Juli 2013, dunduh pada 29 September 2016.

sebagai 'tetap mampu mengendalikan tanpa sedikitpun keluar pergi dari pelabuhan'. Dengan kapal selam yang mumpuni, TNI AL bahkan dapat menggunakan kapal selam yang diparkir sebagai media penggetar bagi negara lain maupun bagi perompak dan pembajak.

Dapat dilihat bahwa pengadaan Chang Bogo dilakukan dengan motivasi yang besar untuk mengawal perbatasan laut Indonesia dan kepentingan strategis yang sangat luas. Kemampuan penggetar yang sangat tinggi ditambah dengan manfaat pengembangan industri pertahanan yang signifikan. PT PAL saat ini sedang membangun galangan kapal selam besar di Surabaya, sebagai fasilitas untuk membuat kapal selam ketiga yang direncanakan akan dibuat pada tahun 2017 mendatang.⁷² Walaupun hanya menjadi konsumen, Indonesia juga dilibatkan dalam pembangunan kapal selam ketiga. Hal ini tentu menjadi nilai tambah bagi Indonesia dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lain yang hanya menjadi konsumen murni. Hal ini sesuai dengan mandat Presiden Joko Widodo yang menstrategikan PT. PAL menjadi industri yang di satu sisi beragam produksi armada maritimnya, namun memiliki divisi khusus masing-masing yang fokus pada produk tertentu.⁷³ Dengan adanya pengembangan Chang Bogo, PT. PAL dapat memuluskan strategi tersebut dan menjadi industri strategis yang semakin terspesialisasi. Dengan memiliki Chang Bogo, Indonesia dapat membangun posisi strategis serta sikap dalam menghadapi kompleksitas regional dan rivalitas negara-negara besar di perairannya.

Dari sisi proyek akuisisi, Indonesia terlibat dalam relasi *international military-industrial complex* (MIC) yang terdiri dari Korea Selatan dan Jerman. Adapun relasi MIC tersebut telah terjadi dalam *joint production* pesawat tempur KF-X/IF-X (*Korean Fighter Experiment/Indonesian Fighter Experiment*).⁷⁴ Dalam proyek tersebut, secara hitam-putih Indonesia hanya terlibat dengan Korea Selatan. Namun jika ditelusuri, Amerika Serikat

⁷² "Pembangunan Fasilitas Produksi Kapal Selam Indonesia", dalam www.jakartagreater.com/pembangunan-fasilitas-produksi-kapal-selam-indonesia/, 26 September 2016, diunduh pada 27 September 2016.

⁷³ "Presiden Jokowi Optimis PT PAL dan PT DOK Bisa Majukan Industri Maritim Indonesia", dalam <http://www.militerhankam.com/2015/01/presiden-jokowi-optimis-pt-pal-dan-pt.html>, 11 Januari 2015, diunduh pada 10 Oktober 2016.

⁷⁴ Semmy T. Armandha, Arwin D.W. Sumari, Haryo B. Rahmadi, "Ekonomi Politik Kerja Sama Korea Selatan-Indonesia dalam *Joint Development* Pesawat Tempur KFX/IFX", *Global dan Strategis*, tahun 10, No. 1, 2016, hlm. 86-87.

turut andil dalam proyek tersebut karena teknologi yang digunakan dalam membangun pesawat tempur tersebut sebagian besar berasal darinya. Amerika Serikat menggunakan kondisi tersebut untuk mengendalikan jalannya proyek tersebut, sehingga proyek tersebut sempat mengalami tarik-ulur. Demikian pula yang terjadi dalam proyek Chang Bogo, dimana Jerman memiliki lisensi kapal selam Tipe 209 yang dikembangkan lebih lanjut oleh Korea Selatan.

Translasi yang terbangun dari relasi MIC Jerman-Korea Selatan-Indonesia juga dapat disebut sebagai translasi rantai pasok global (*Global Supply Chain*).⁷⁵ Dalam kondisi keterlibatan ini, Indonesia sebenarnya sudah mengambil sikap untuk membebaskan dirinya dari persaingan fisik dan konfrontasi langsung dengan kekuatan-kekuatan kapal selam besar di dunia, khususnya yang terlibat di perairan Asia Tenggara. Namun hal ini bukan untuk menyamakan keterlibatan dalam rantai pasok global industri pertahanan merupakan strategi untuk menggantikan persaingan fisik. Keduanya tetap merupakan dua hal yang berbeda. Dengan terlibat dalam relasi MIC, Indonesia terlibat pula dalam rantai pasok global. Hal ini memungkinkan Indonesia tidak kembali lagi menjadi konsumen murni yang cenderung mudah dikendalikan oleh kekuatan besar.

Relasi antara Indonesia dengan negara-negara tetangga-nya yang berada di Asia Tenggara juga turut menentukan translasi. Indonesia tergolong sebagai salah satu negara yang tidak memihak, namun menjalin hubungan dengan Amerika Serikat maupun Tiongkok (politik *hedging*).⁷⁶ Indonesia bersama dengan Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand ikut bergabung dalam Cobra Gold (latihan militer bersama) dengan Amerika Serikat.⁷⁷ Di sisi lain, Indonesia dan Tiongkok mengadakan kerja sama

⁷⁵ Michael Callon membuat konsep yang hampir mirip berdasarkan teori ANT: 'techno-economic network', yakni jejaring yang menghubungkan antara sains, teknis, dan pasar. Jejaring tersebut menunjukkan relasi antara aktor manusia sebagai pengambil keputusan dengan teknologi sebagai aktan, dan pasar sebagai media (*intermediaries*). Secara lebih konkrit, Jeffrey Henderson dkk dengan dasar teori yang sama mengembangkan istilah *Global Production Network* dari kajiannya terhadap integrasi ekonomi global. Lihat Michael Callon, "Techno-economic networks and irreversibility" dalam John Law (ed), *A Sociology of Monsters: Essays on Power, Technology, and Domination*, (London & New York: Routledge), hlm 132; dan Jeffrey Henderson et al, "Global production networks and the analysis of economic development", *Review of International Political Economy*, 9:3, 2002, hlm. 436

⁷⁶ Evelyn Goh, *op.cit.*

⁷⁷ *Ibid.*

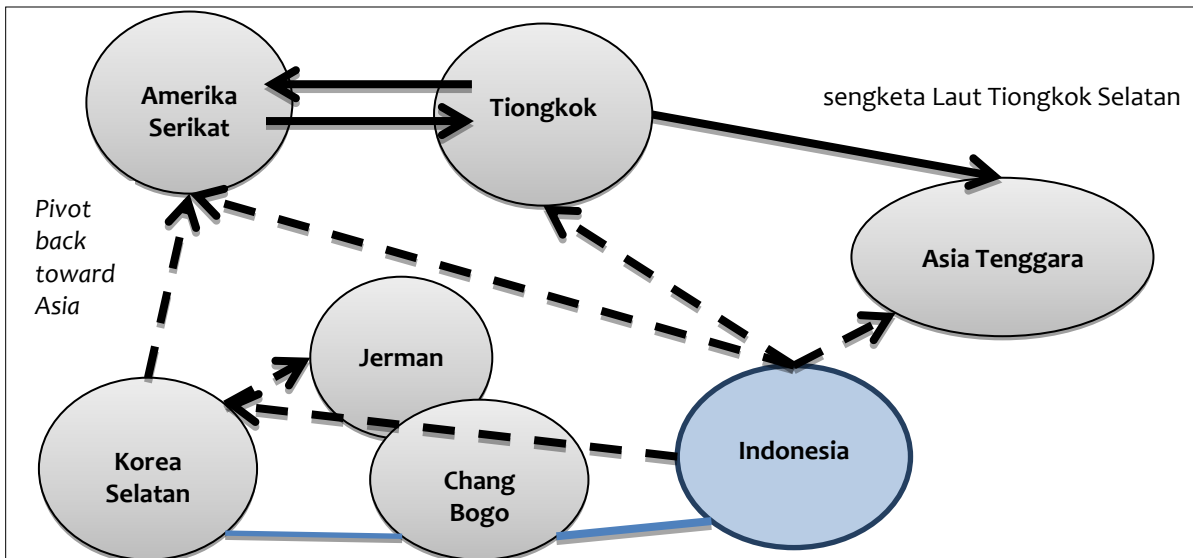
kemitraan strategis berupa latihan bersama.⁷⁸ Pengalaman embargo Amerika Serikat terhadap Indonesia pada era transisi Orde Baru ke Orde Reformasi merupakan salah satu faktor utama yang membuat Indonesia tidak memihak pada satu kekuatan besar. Posisi kepemimpinan Indonesia yang kuat di ASEAN sangat bergantung pada kenetralan tersebut, namun di sisi lain memanfaatkan kekuatan-kekuatan besar yang sudah terlanjur melakukan penetrasi di Asia Tenggara.

Penjelasan argumentasi tersebut untuk menunjukkan bahwa kapal selam Chang Bogo, politik bebas aktif Indonesia, rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok, dan relasi negara-negara Asia Tenggara; adalah aktan-aktan yang membentuk suatu sistem jejaring. Jika ingin melihat politik bebas aktif Indonesia, adalah dengan menggunakan lensa berpikir sistemik jejaring ini. Artinya tanpa aktan-aktan tersebut, politik bebas aktif Indonesia hanya akan menjadi jargon. Pengadaan kapal selam Chang Bogo menambah kuatnya translasi politik bebas aktif dalam aspek ruang rantai pasok global, satu paket dengan bertambahnya daya gentar pertahanan maritim Indonesia. Aktan-aktan tersebut mentranslasikan Indonesia mengusung politik bebas aktif, dan sebaliknya, politik bebas aktif memungkinkan translasi eksternal (Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara Asia Tenggara) terjadi.

Ilustrasi pada Gambar 1 dapat menjelaskan hal ini secara sederhana. Dalam ilustrasi tersebut dapat dijelaskan bahwa garis penuh menunjukkan relasi tensi ketegangan yang ada di antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan Asia Tenggara; sedangkan garis putus-putus adalah relasi kerja sama. Indonesia dapat dilihat tidak memiliki relasi tensi ketegangan dengan siapapun. Politik bebas aktif Indonesia dapat diletakan dalam konteks relasi tersebut. Hadirnya Chang Bogo yang merupakan hasil dari relasi dengan Korea Selatan dan Jerman merupakan modal kuat rantai pasok MIC. Artinya, rantai pasok tersebut dapat menjadi jejaring bagi Indonesia untuk memperkuat industri pertahannya, walaupun Indonesia sebagian besar masih menjadi konsumen murni.

⁷⁸ Andrew S. Erickson, "Maritime Security Cooperation in the South China Sea Region", dalam Wu Sichun dan Zou Keyuan (ed), *Maritime Security in the South China Sea: Regional Implications and International Cooperation*. (Farnham: Ashgate Publishing, 2009), hlm. 52

Gambar 1. Ilustrasi Jejaring-Aktor Politik Bebas Aktif Indonesia dalam menghadapi Rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok di Asia Tenggara melalui Kapal Selam Chang Bogo



Kesimpulan

Artikel ini berupaya melihat pengadaan kapal selam Kelas Chang Bogo yang dilakukan Indonesia, dari sisi yang berbeda. Pengadaan kapal selam tersebut dapat dipastikan tidak dapat menyaingi kapal selam yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan Tiongkok, namun keberadaannya masih lebih penting ketimbang tidak ada sama sekali. Pertama, karena hadirnya kapal selam Kelas Chang Bogo merupakan hasil kolaborasi Indonesia bersama Korea Selatan dengan menggunakan platform teknologi Jerman, yang menunjukkan bahwa Indonesia terlibat dalam jejaring produksi global. Posisi ini memungkinkan Indonesia diperhitungkan dalam kompleksitas industri-militer internasional. Kedua, kapal selam Kelas Chang Bogo dapat menjadi penggetar, minimal terhadap negara-negara di sekitarnya yang juga sedang dalam upaya modernisasi kapal selam, dan juga ancaman-ancaman non-tradisional yang berasal dari teroris dan pembajak.

Dalam kondisi tersebut, politik luar negeri bebas aktif Indonesia dapat diletakkan dalam konteks *actor-network state*; yakni berupaya memanfaatkan jejaring (baik produksi dan rantai pasok maupun diplomasi), guna menangkal ancaman dari rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok. Mengaplikasikan hipotesis kerja Jim Johnson dan prinsip teori jejaring-aktor; adanya kapal selam Chang Bogo dapat menghadirkan *stateness* bagi Indonesia itu sendiri. Sederhananya, politik bebas aktif untuk menghadapi lingkungan strategis maritim di Asia Tenggara, adalah memperkuat keterlibatan Indonesia dalam rantai pasok global,

dan mempertahankan ketidakberpihakan kepada salah satu kekuatan atau kelompok kekuatan. Strategi ini dapat menjelaskan kondisi keamanan maritim secara koheren, yang oleh karenanya dapat memformulasikan sikap Indonesia secara koheren pula. Menghadapi ancaman yang penuh dengan ketidakpastian, ditambah dengan kompleksitas kesalingketergantungan dalam sektor ekonomi antar negara di era globalisasi masa kini, membutuhkan tidak lagi sekedar sikap asertif melainkan juga kemampuan untuk membaca peta persaingan.

Daftar Pustaka

Buku

- Deleuze, Gilles. 1986. *Foucault*. Frankfurt: Suhrkamp.
- Dewan Kelautan Indonesia. 2008. *Evaluasi Kebijakan dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia*. Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Guan, Kwa Chong dan John K. Skogan. 2007. *Maritime Security in Southeast Asia*. New York: Routledge
- Hardy, Corwin J. 2015. *At periscope depth: exploring submarine proliferation in Southeast Asia*. Monterey: Dudley Knox Library
- Howarth, Peter. 2006. *China's Rising Sea Power: The PLA Navy's Submarine Challenge*. New York: Routledge
- Law, John. 2002. *Aircraft Stories: Decentering the Object in Technoscience*. Durham & London: Duke University Press
- Law, John (ed). 1991. *A Sociology of Monsters: Essays on Power, Technology, and Domination*. London & New York: Routledge
- Passoth, Jan-Hendrik et al (ed). 2012. *Agency without Actors? New Approaches to Collective Action*. New York: Routledge
- Piliang, Yasraf Amir. 2004. *Dunia yang Dilipat Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan*. Yogyakarta: Jalasutra
- Sichun, Wu dan Zou Keyuan (ed). 2009. *Maritime Security in the South China Sea: Regional Implications and International Cooperation*. Farnham: Ashgate Publishing
- Sumarkidjo, Atmadji. 2010. *Mission Accomplished: Misi Pendaratan Pasukan Khusus oleh Kapal Selam RI Tjandrasa*. Jakarta: Kata Hasta
- Tan, Andrew. 2011. *Security Strategies in the Asia-Pacific: The United States "Second Front" in Southeast Asia*. New York: Palgrave Mcmillan

Jurnal

- Andersson, Jan J. 2015. "Submarine Capabilities and Conventional Deterrence in Southeast Asia". *Contemporary Security Policy*. Vol.36. No.3.

- Armandha, Semmy T., et al. 2016. "Ekonomi Politik Kerja Sama Korea Selatan-Indonesia dalam *Joint Development Pesawat Tempur KFX/IFX*". *Global dan Strategis*. Tahun 10, No. 1.
- Barkin, J. Samuel. 1998. "The Evolution of the Constitution of Sovereignty and the Emergence of Human Rights Norms". *Millenium Journal of International Studies*. Vol. 27, No. 2.
- Beng, Aaron. 2014. "Submarine Procurement in Southeast Asia: Potential for Conflict and Prospects for Cooperation". *Pointer. Journal of the Singapore Armed Forces*. Vol. 40.No. 1
- Henderson, Jeffrey et al. 2002. "Global Production Networks And The Analysis Of Economic Development". *Review of International Political Economy*. Vol. 9. No.3.
- International Institute for Strategic Studies. 2016. "Chapter Six: Asia". *The Military Balance*. Vol. 116. No.1.
- International Institute for Strategic Studies. 2016. "Chapter Three: North America". *The Military Balance*. Vol. 116. No.1.
- Nelson, Brad. 2013. "Brokering China-US relations". *Strategic Review*. Vol. 3. No.3.
- Passoth, Jan-Hendrik & Nicholas J. Rowland. 2010. "Actor-Network State: Integrating Actor-Network Theory and State Theory". *International Sociology*. Vol. 25. No.6.
- Roy, Denny. 2005. "Southeast Asia and China: Balancing or Bandwagoning?". *Contemporary Southeast Asia*. Vol. 27. No. 2.
- Srnicek, Nick. 2010. "Conflict Networks: Collapsing the Global into Local". *Journal of Critical Globalisastion Studies*. Issue 2.

Majalah

- Ramachandran, Sudha. 2004."Division Over Terror Threat in Malacca Straits". *Asia Times*.

Prosiding

- Yanuar et al. 2015. "Konsep Desain Kapal Selam Serang Konvensional". *Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XIV (SNTTM XIV)*. Banjarmasin, 7-8 Oktober.

Website

- Chang, Felix K, "Comparative Southeast Asian Military Modernization – III", <http://www.theasanforum.org/comparative-southeast-asian-military-modernization-3/>, 16 Januari 2015, diunduh pada 1 Oktober 2016.
- "China is Fueling a Submarine Arms Race in the Asia-Pasific", *Foreign Policy*, <http://foreignpolicy.com/2016/08/26/china-is-fueling-a-submarine-arms-race-in-the-asia-pacific/>, 26 Agustus 2016, diunduh pada 30 September 2016.
- "China says it's ready if US 'stirs up any conflict' in South China Sea",CNBC, <http://www.cnbc.com/2016/05/19/china-says-its-ready-if-us-stirs-up-any-conflict-in-south-china-sea.html>, 19 Mei 2016, diunduh pada 3 Oktober 2016.
- Fong, Kelvin "Undersea Dragons Ahoy! Asian Submarine Forces on the Rise", www.shpmedia.com, Mei 2009, diunduh pada 2 September 2016.
- "France offers Indonesian Navy's Diesel-Electric Sub New Combat System", dalam <http://thediplomat.com/2016/01/france-offers-indonesian-navys-diesel-electric-sub-ne-combat-system/>, 12 Januari 2016, diunduh pada 1 Oktober 2016.

- Goh, Evelyn, "Southeast Asian Strategies toward the Great Powers: Still Hedging after all these years?", <http://www.theasanforum.org/southeast-asian-strategies-toward-the-great-powers-still-hedging-after-all-these-years/>, 22 Februari 2016, diunduh pada 1 Oktober 2016.
- "Indonesia Submarine Capabilities", (Nuclear Threat Initiative)", <http://www.nti.org/analysis/articles/indonesia-submarine-capabilities/>, 2 Agustus 2013, diunduh pada 29 September 2016.
- "Indonesia's Submarine doctrine explained", The Diplomat, www.thediplomat.com/2013/07/indonesias-submarine-doctrine-explained/, 19 Juli 2013, diunduh pada 29 September 2016.
- Law, John, "Actor Network Theory and Material Semiotics", dalam <http://www.heterogeneities.net/publications/Law2007ANTandMaterialSemiotics.pdf>, 25 April 2007, diunduh pada 1 Agustus 2016.
- Poling, Gregory B, "Dynamic Equilibrium: Indonesia's Blueprint for a 21st Century Asia Pasific", www.csis.org/analysis/dynamic-equilibrium-indonesia-s-blueprint-21st-century-asia-pasific, 8 Maret 2013, diunduh pada 26 September 2016.
- Supriyanto, Ristian A, "Developing Indonesia's Maritime Strategy under President Jokowi", *The ASAN Forum*, Vol. 4, No. 4, Juli-Agustus 2016, dalam <http://www.theasanforum.org/developing-indonesias-maritime-strategy-under-president-jokowi-1/>), diunduh pada 20 September 2016.
- , "Strategic Funnels': Deciphering Indonesia's Submarine Ambitions", RSIS Commentary, dalam www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/co15263-strategic-funnels-deciphering-indonesias-submarine-ambitions/, 3 Desember 2015), diunduh pada 20 September 2016.
- "Sophisticated Features of Indonesia's Submarine Made in S. Korea", <http://en.tempo.co/read/news/2016/03/24/056756747/Sophisticated-Features-of-Indonesias-Submarine-Made-in-S-Korea>, 24 Maret 2016, diunduh pada 15 September 2016.
- "Submarine: Chang Bogo Heads For Indonesia", dalam <https://www.strategypage.com/htmw/htsub/20160430.aspx>, 30 April 2016, diunduh pada 15 September 2016.
- The Diplomat, "South Korea Launches First Indonesian Stealth Submarine", <http://thediplomat.com/2016/03/south-korea-launches-first-indonesian-stealth-submarine/>, 29 Maret 2016, diunduh pada 15 September 2016.
- "The 'Inevitable War' Between The U.S. and China", Newsweek, <http://www.newsweek.com/south-china-sea-war-nuclear-submarines-china-united-states-barack-obama-xi-473428>, 22 Juni 2016, diunduh pada 3 Oktober 2016.
- "The 'Inevitable War' Between The U.S. and China", Newsweek, <http://www.newsweek.com/south-china-sea-war-nuclear-submarines-china-united-states-barack-obama-xi-473428>, 22 Juni 2016, diunduh pada 3 Oktober 2016.
- "Pembangunan Fasilitas Produksi Kapal Selam Indonesia", dalam www.jakartagreater.com/pembangunan-fasilitas-produksi-kapal-selam-indonesia/, 26 September 2016, diunduh pada 27 September 2016.

